



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDY ARDIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **928383**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.690.160.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 229.680.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m²/90 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 374.820.000
3. Tanah Seluas 1490 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 190.720.000
4. Tanah Seluas 6493 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 831.104.000
5. Tanah Seluas 5832 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 746.496.000
6. Tanah Seluas 345 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 276.690.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/50 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 40.650.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **79.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA STATION WAGON Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UW125SC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **15.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.784.160.000
III. HUTANG	Rp.	151.532.743
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.632.627.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.